

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFISIENSI ANGGARAN DANA DESA PADA KECAMATAN SUNGAI APIT

Nelly Safitri¹, Yevi Dwitayanti², Rahmawaty Hasibuan³

^{1, 2, 3}Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Email: nellyyysafitri@gmail.com

Article History

Received: 19-07-2026

Revision: 04-08-2026

Accepted: 08-08-2026

Published: 11-08-2026

Abstract. This study aims to analyze the influence of the Internal Control System, Community Participation, and Transparency on Village Fund Budget Efficiency—both individually and simultaneously—in Sungai Apit District, Siak Regency, Riau Province. A quantitative approach was employed, utilizing primary data collected via questionnaires. The study population comprised 14 villages, with a sample of 42 respondents selected through purposive sampling, including Village Heads, Village Secretaries, and Financial Officers/Treasurers. Data were analyzed using multiple linear regression with the aid of IBM SPSS Statistics. The results indicate that the Internal Control System did not significantly affect Village Fund Budget Efficiency ($\beta = -0.051$; $t = -0.147$; $p = 0.884$). Similarly, Community Participation did not have a significant effect at the 5% level ($\beta = 0.387$; $t = 1.829$; $p = 0.075$), although it showed a tendency toward a positive influence at the 10% level. Transparency also showed no significant effect ($\beta = -0.073$; $t = -0.207$; $p = 0.837$). However, when considered simultaneously, the three variables significantly influenced Village Fund Budget Efficiency ($F = 3.891$; $p = 0.016$) and explained 23.5% of the variation in budget efficiency ($R^2 = 0.235$). These findings suggest that budget efficiency is more meaningfully influenced by the combination of internal control, community participation, and transparency.

Keywords: Internal Control System, Community Participation, Transparency, Village Fund Budget Efficiency.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa, baik secara parsial maupun simultan, di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi penelitian terdiri atas 14 desa dengan sampel sebanyak 42 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan/Bendahara. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa ($\beta = -0,051$; $t = -0,147$; $p = 0,884$), sedangkan Partisipasi Masyarakat juga tidak berpengaruh signifikan pada taraf 5% ($\beta = 0,387$; $t = 1,829$; $p = 0,075$), tetapi menunjukkan kecenderungan pengaruh positif pada taraf 10%. Transparansi tidak berpengaruh signifikan ($\beta = -0,073$; $t = -0,207$; $p = 0,837$). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa ($F = 3,891$; $p = 0,016$) dan menjelaskan 23,5% variasi efisiensi anggaran ($R^2 = 0,235$). Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dipengaruhi secara lebih bermakna melalui kombinasi pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan transparansi.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Efisiensi Anggaran Dana Desa.

How to Cite: Safitri, N., Dwitayanti, Y., & Hasibuan, R. (2026). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa pada Kecamatan Sungai Apit. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 5279-5294. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.7157>

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai desa secara utama ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur antara lain kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan, keuangan dan aset desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan pelaksanaannya saat ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur antara lain keuangan dan aset desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan desa.

Salah satu konsekuensi dari kewenangan tersebut adalah meningkatnya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, efisiensi anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan desa. Efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan pengeluaran, tetapi juga kemampuan pemerintah desa menghasilkan keluaran dan manfaat pembangunan yang optimal dengan sumber daya yang tersedia (Mardiasmo, 2018).

Efisiensi pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh mekanisme pengelolaan dan pengawasan yang diterapkan. Salah satu faktor internal yang berpotensi memengaruhi efisiensi adalah Sistem Pengendalian Internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses integral yang dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan Dana Desa, pengendalian internal yang memadai dapat membantu mencegah kesalahan, penyimpangan, dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

Selain faktor internal pemerintah, efisiensi anggaran juga berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan. Partisipasi masyarakat memungkinkan pemerintah desa memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan prioritas masyarakat

sehingga penggunaan anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Partisipasi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, transparansi diperlukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan dan menilai kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan program yang dilaksanakan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi berkaitan dengan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Hidayat, 2019; Lestari, 2022; Siti Umaira & Adnan, 2019).

Kondisi empiris di Kecamatan Sungai Apit menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa berlangsung dalam konteks perubahan kebutuhan dan kebijakan pembangunan desa selama periode 2020–2025. Perubahan prioritas penggunaan anggaran selama masa pandemi, termasuk pengalihan sebagian anggaran pembangunan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang berlaku. Setelah periode pandemi, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa semakin meningkat. Kondisi tersebut menjadikan efisiensi anggaran relevan untuk dikaji karena perubahan prioritas anggaran menuntut pemerintah desa untuk tetap menjaga ketepatan sasaran, kualitas keluaran, dan manfaat pembangunan.

Tabel 1. Fenomena di Kecamatan Sungai Apit (2020–2025)

Periode	Kondisi/Fenomena	Aspek Pengelolaan Dana Desa	Implikasi terhadap Efisiensi Anggaran
2020–2022	Terjadi perubahan prioritas penggunaan Dana Desa akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan pemerintah. Sebagian anggaran pembangunan dialihkan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.	Penyesuaian alokasi anggaran dan validasi data penerima bantuan	Efisiensi dituntut melalui ketepatan sasaran penerima dan pencegahan tumpang tindih bantuan.
2023–2024	Prioritas pembangunan mulai kembali diarahkan pada pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur desa serta program pemberdayaan masyarakat.	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan desa	Efisiensi tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas output dan keberlanjutan manfaat pembangunan.
2025	Pengelolaan Dana Desa semakin diarahkan pada program yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta	Penentuan prioritas program berdasarkan manfaat dan	Efisiensi perlu mempertimbangkan kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan, output yang

mendukung penguatan ekonomi lokal.	kebutuhan masyarakat	dihasilkan, dan manfaat bagi masyarakat.
------------------------------------	----------------------	--

Sumber: *Dasar Kebijakan Pusat (Kementerian Keuangan & Kemendesa), Capaian Kinerja Pemkab Siak (BKD & DPMK Siak).*

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran Dana Desa perlu dilihat tidak hanya dari aspek penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas proses pengelolaan dan manfaat yang dihasilkan. Perubahan prioritas penggunaan Dana Desa selama 2020–2025 memperlihatkan pentingnya mekanisme pengendalian internal untuk memastikan anggaran digunakan sesuai ketentuan, partisipasi masyarakat untuk memastikan program sesuai kebutuhan, serta transparansi agar penggunaan anggaran dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut secara teoritis memiliki keterkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan efisiensi anggaran.

Penelitian terdahulu memberikan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Hidayat (2019) menguji pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efisiensi anggaran Dana Desa dan menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki keterkaitan dengan efisiensi pengelolaan anggaran. Penelitian lain lebih banyak menguji transparansi, partisipasi, atau pengendalian internal terhadap akuntabilitas dan kualitas pengelolaan Dana Desa, tetapi belum banyak menguji ketiga variabel tersebut secara simultan dengan efisiensi anggaran sebagai variabel dependen. Misalnya, penelitian Siti Umaira dan Adnan (2019) menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, sedangkan penelitian Ramadhani (2023) menunjukkan relevansi sistem pengendalian internal dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. Perbedaan fokus dan variabel tersebut menunjukkan masih terdapat ruang untuk menguji bagaimana pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan transparansi secara bersama-sama berkaitan dengan efisiensi anggaran Dana Desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, research gap penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan tiga aspek tata kelola, yaitu Sistem Pengendalian Internal sebagai mekanisme pengendalian internal pemerintah desa, Partisipasi Masyarakat sebagai mekanisme pengawasan dan penentuan kebutuhan dari sisi masyarakat, serta Transparansi sebagai mekanisme keterbukaan informasi publik, terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa. Penelitian ini juga mengambil konteks Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, yang memiliki karakteristik dan dinamika pengelolaan Dana Desa tersendiri selama periode 2020–2025. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereplikasi penelitian Hidayat (2019), tetapi memperluas model penelitian dengan memasukkan Sistem Pengendalian Internal dan menguji ketiga faktor tersebut secara simultan dalam konteks pengelolaan Dana Desa di Kecamatan

Sungai Apit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor tata kelola yang berkaitan dengan efisiensi pengelolaan Dana Desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam memperkuat pengendalian, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memperluas transparansi pengelolaan anggaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif (*explanatory research*) yang bertujuan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel berdasarkan data yang diperoleh dari responden dan dianalisis secara statistik. Penelitian dilaksanakan pada 14 desa di Kecamatan Sungai Apit. Populasi penelitian adalah seluruh perangkat pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi, yaitu: (1) menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, atau Kaur Keuangan/Bendahara; (2) terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, atau pertanggungjawaban Dana Desa; (3) telah menjalankan tugas pada jabatan tersebut minimal satu tahun; dan (4) bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 42 responden dari 14 desa, masing-masing terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan/Bendahara.

Data penelitian berupa data primer yang diperoleh melalui kuesioner dengan skala Likert lima poin, yaitu 1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju. Variabel independen terdiri atas Sistem Pengendalian Internal (X_1), Partisipasi Masyarakat (X_2), dan Transparansi (X_3), sedangkan variabel dependen adalah Efisiensi Anggaran Dana Desa (Y). Indikator setiap variabel disusun berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Sebelum analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi yang diperlukan. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi residual, uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi yang tinggi antarvariabel

independen, sedangkan uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui kesamaan varians residual. Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan: Y = Efisiensi Anggaran Dana Desa; α = konstanta; β_1 , β_2 , β_3 = koefisien regresi; X_1 = Sistem Pengendalian Internal; X_2 = Partisipasi Masyarakat; X_3 = Transparansi; dan ε = *error*. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji *t* untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial dan uji *F* untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan.

HASIL

Uji Normalitas

Tabel 1. Tabel Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.65974727
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.069
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Dari tabel 1, terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,200 > 0,05. Dengan demikian berdasarkan kriteria pengujian maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data berdistribusi normal. Berdasarkan hal tersebut maka sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat dan transparansi memiliki data yang berdistribusi normal.

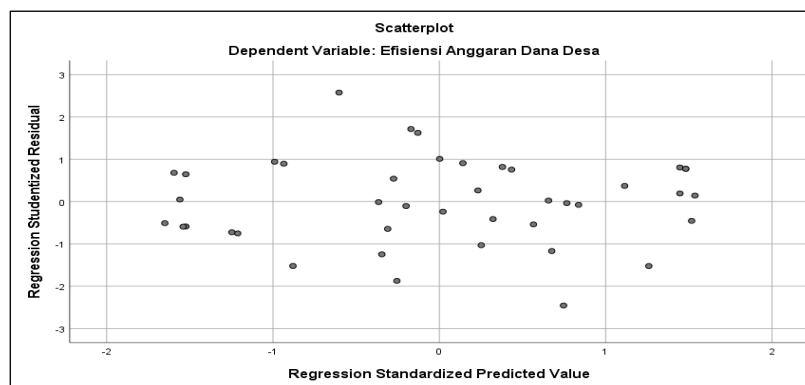
Uji Multikolonieritas

Tabel 2. Multikolonieritas

		Coefficients^a			t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	28.971	10.222		2.834	.007		
	Sistem Pengendalian Internal	-.033	.220	-.051	-.147	.884	.166	6.016
	Partisipasi Masyarakat	.287	.157	.387	1.829	.075	.448	2.230
	Transparansi	-.051	.245	-.073	-.207	.837	.161	6.208

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui pada perhitungan nilai *Tolerance* tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan yang sama ditunjukkan pada nilai VIF, dimana tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 1. Uji heteroskedastisitas

Dari grafik Scatterplots dalam Gambar 4.3. menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 2. Uji signifikan parsial

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.		
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	28.971	10.222		2.834	.007		
	Sistem Pengendalian Internal	-.033	.220	-.051	-.147	.884	.166	6.016
	Partisipasi Masyarakat	.287	.157	.387	1.829	.075	.448	2.230
	Transparansi	-.051	.245	-.073	-.207	.837	.161	6.208

a. Dependent Variable: Efisiensi Anggaran Dana Desa

Berdasarkan Uji t diatas nilai t-hitung untuk variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar -0,147 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,884. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf nyata yang ditentukan yaitu 0,05 ($0,884 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa. Koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,033 mengindikasikan hubungan yang tidak nyata dan berlawanan arah. Nilai t-hitung untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X2) sebesar 1,829 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,075. Jika pengujian menggunakan batas signifikansi ketat $\alpha = 5\%$ (0,05), maka nilai Sig. $0,075 > 0,05$, yang berarti Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan secara parsial pada tingkat kepercayaan 95%. Namun, variabel ini memiliki pengaruh signifikan pada tingkat toleransi 10% (0,10) karena $0,075 < 0,10$, menunjukkan adanya kontribusi positif yang marginal atau cenderung berpengaruh terhadap efisiensi anggaran. Nilai t-hitung untuk variabel Transparansi (X3) sebesar -0,207 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,837. Nilai signifikansi tersebut jauh lebih besar dari taraf nyata 0,05 ($0,837 > 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 28,971 - 0,033 X_1 + 0,287 X_2 - 0,051X_3 + e$$

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 3. Uji signifikan simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34.698	3	11.566	3.891	.016 ^b
	Residual	112.945	38	2.972		
	Total	147.643	41			

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F-hitung sebesar 3,891 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,016. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf nyata yang ditentukan, yaitu 0,05 ($0,016 < 0,05$). Hasil pengujian statistik ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa. Hasil uji F yang signifikan ini mengindikasikan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini sudah tepat (goodness of fit) dan layak untuk digunakan dalam memprediksi tingkat Efisiensi

Anggaran Dana Desa berdasarkan kontribusi bersama dari seluruh variabel independen yang diteliti. Karena nilai Sig. 0,016 lebih kecil dari 0,05 ($0,016 < 0,05$), maka secara simultan (bersama-sama), variabel Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa.

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Pengujian koefisien determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.485 ^a	.235	.175	1.724

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R sebesar 0,485 yang menunjukkan adanya hubungan simultan antara Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi dengan Efisiensi Anggaran Dana Desa. Sementara itu, nilai R Square sebesar 0,235 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 23,5% variasi Efisiensi Anggaran Dana Desa, sedangkan 76,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, kemampuan model dalam menjelaskan variasi Efisiensi Anggaran Dana Desa masih relatif terbatas, sehingga terdapat faktor lain di luar Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi yang turut berpotensi memengaruhi efisiensi anggaran.

DISKUSI

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa pada tingkat signifikansi 5%. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pengendalian internal secara formal belum tentu diikuti oleh peningkatan efisiensi anggaran. Dalam konteks pemerintahan desa, pengendalian internal dapat saja telah diterapkan untuk memenuhi ketentuan administratif, tetapi efektivitasnya dalam mengarahkan penggunaan anggaran secara ekonomis masih bergantung pada kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut atas temuan pengendalian.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif *Stewardship Theory*, yang menempatkan perangkat desa sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik bagi kepentingan masyarakat. Secara teoretis, sistem pengendalian internal seharusnya memperkuat perilaku tersebut melalui mekanisme pengawasan, pemisahan tugas, prosedur kerja, dan pengelolaan risiko. Namun, apabila pengendalian lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif daripada pengendalian substantif terhadap penggunaan anggaran, keberadaannya belum tentu menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi ideal pengendalian internal dalam teori dan penerapannya dalam praktik pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2022) dan Rahmawati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Namun, temuan ini berbeda dengan Sari (2021) serta Pratama dan Hidayat (2023) yang menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan anggaran. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dapat dipengaruhi oleh kondisi organisasi dan kapasitas aparatur di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal tidak cukup dilakukan melalui penyusunan prosedur, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan yang konsisten, dan tindak lanjut terhadap penyimpangan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa

Partisipasi Masyarakat belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa pada tingkat signifikansi 5%. Meskipun demikian, koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan arah hubungan yang sesuai dengan dugaan teoritis. Nilai signifikansi 0,075 juga menunjukkan adanya kecenderungan hubungan yang lebih dekat dengan tingkat signifikansi 10%, tetapi temuan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyatakan adanya pengaruh signifikan apabila penelitian menetapkan $\alpha = 5\%$. Secara substantif, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya menghasilkan efisiensi anggaran. Partisipasi masyarakat mungkin telah berlangsung melalui musyawarah perencanaan pembangunan, penyampaian aspirasi, dan kegiatan pengawasan, tetapi kualitas keterlibatan tersebut belum tentu cukup kuat untuk memengaruhi keputusan penggunaan anggaran. Partisipasi yang bersifat formal atau hanya berfokus pada kehadiran dalam forum belum tentu menghasilkan kontrol sosial yang efektif terhadap prioritas dan realisasi anggaran.

Dalam perspektif *Stewardship Theory*, partisipasi masyarakat dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa sebagai *steward* dan masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat pengelolaan sumber daya publik. Keterlibatan masyarakat memungkinkan pemerintah memperoleh informasi mengenai kebutuhan prioritas sekaligus meningkatkan pengawasan sosial. Namun, agar mekanisme tersebut menghasilkan efisiensi, partisipasi perlu bersifat substantif, yaitu masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, memengaruhi keputusan, serta memperoleh informasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat memberikan arah positif terhadap pengelolaan keuangan desa, tetapi pengaruhnya tidak selalu signifikan ketika keterlibatan masyarakat masih terbatas. Sebaliknya, penelitian yang menemukan pengaruh signifikan menunjukkan bahwa partisipasi yang lebih aktif dan substantif dapat memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan partisipasi saja belum memadai; kualitas, intensitas, dan keterwakilan masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa menjadi aspek yang menentukan efektivitasnya.

Pengaruh Transparansi terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa pada tingkat signifikansi 5%. Temuan ini tidak berarti bahwa transparansi tidak bermanfaat dalam tata kelola desa, tetapi menunjukkan bahwa berdasarkan data penelitian ini belum terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa variasi transparansi berpengaruh terhadap efisiensi anggaran.

Salah satu kemungkinan yang dapat menjelaskan temuan tersebut adalah bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya diikuti oleh pemanfaatan informasi sebagai instrumen pengawasan dan pengambilan keputusan. Penyampaian informasi mengenai APBDes, kegiatan pembangunan, atau realisasi anggaran dapat memenuhi prinsip keterbukaan secara administratif, tetapi dampaknya terhadap efisiensi akan lebih besar apabila informasi tersebut mudah dipahami, mudah diakses, dan dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian, transparansi perlu dipahami bukan hanya sebagai kewajiban menyediakan informasi, tetapi juga sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengetahui, menilai, dan mengawasi penggunaan Dana Desa.

Dalam perspektif *Stewardship Theory*, transparansi merupakan salah satu mekanisme yang dapat memperkuat kepercayaan antara pemerintah desa sebagai *steward* dan masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat pengelolaan Dana Desa. Informasi yang terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong pemerintah desa untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sumber daya publik. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada kualitas informasi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya untuk pengawasan. Oleh karena itu, tidak signifikannya pengaruh transparansi dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai indikasi bahwa mekanisme keterbukaan informasi belum secara langsung diterjemahkan menjadi kontrol yang mampu memengaruhi efisiensi anggaran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari (2023) serta Putra dan Hidayat (2024) yang menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap efisiensi atau kinerja pengelolaan anggaran ketika keterbukaan informasi belum disertai mekanisme pengawasan yang efektif. Namun, hasil tersebut berbeda dengan Ramadhan (2022) serta Utami dan Wijaya (2025) yang menemukan pengaruh positif transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas transparansi bersifat kontekstual dan dapat dipengaruhi oleh kualitas informasi, literasi masyarakat, akses terhadap informasi, serta keberadaan mekanisme akuntabilitas di tingkat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen belum memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa pada tingkat 5%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan transparansi secara terpisah, tetapi juga oleh kualitas penerapannya dan keterkaitan antarmekanisme tata kelola tersebut. Temuan ini menjadi semakin penting karena hasil uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Dengan demikian, peningkatan efisiensi Dana Desa lebih tepat diarahkan pada penguatan tata kelola secara terpadu, bukan hanya pada peningkatan salah satu mekanisme secara individual.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan Dana Desa lebih tepat dipahami sebagai hasil dari keterkaitan berbagai mekanisme tata kelola, bukan semata-

mata akibat satu faktor. Pengendalian internal berperan memastikan proses pengelolaan berjalan sesuai prosedur, partisipasi masyarakat memberikan kontrol sosial terhadap prioritas penggunaan anggaran, sedangkan transparansi menyediakan informasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan. Temuan tersebut sejalan dengan *Stewardship Theory* yang memandang pemerintah desa sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik bagi kepentingan masyarakat. Ketiga mekanisme tersebut dapat saling melengkapi dalam mendukung perilaku pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh mekanisme memberikan pengaruh signifikan secara individual pada tingkat 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan masing-masing mekanisme belum tentu cukup apabila diterapkan secara terpisah, tetapi kombinasi ketiganya dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi pengelolaan Dana Desa.

Secara praktis, temuan ini memberikan beberapa implikasi bagi pemerintah desa di Kecamatan Sungai Apit. Pertama, pemerintah desa perlu memperkuat sistem pengendalian internal tidak hanya pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga pada pengawasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan anggaran. Kedua, partisipasi masyarakat perlu diarahkan dari sekadar kehadiran dalam musyawarah menjadi keterlibatan substantif dalam penentuan prioritas, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi hasil pembangunan. Ketiga, transparansi perlu ditingkatkan melalui penyediaan informasi anggaran yang mudah diakses dan dipahami masyarakat, misalnya melalui media informasi desa dan kanal digital. Transparansi yang informatif akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut yang jelas.

Implikasi lainnya berkaitan dengan koordinasi antarpihak. Pemerintah desa perlu mengintegrasikan hasil musyawarah masyarakat dengan proses penganggaran dan mekanisme pengendalian internal sehingga kebutuhan masyarakat tidak hanya menjadi masukan formal, tetapi menjadi dasar dalam penetapan prioritas anggaran. Dengan demikian, pengendalian internal, partisipasi, dan transparansi dapat berfungsi sebagai satu kesatuan mekanisme tata kelola. Temuan ini juga menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi Dana Desa tidak cukup dilakukan melalui peningkatan penyerapan anggaran, tetapi perlu diarahkan pada kesesuaian antara anggaran, output kegiatan, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Meskipun ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan, nilai R Square sebesar 23,5% menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut hanya menjelaskan sebagian variasi Efisiensi Anggaran Dana Desa. Artinya, masih terdapat 76,5% variasi yang berkaitan dengan faktor lain di luar model penelitian. Oleh karena itu, pemerintah desa juga perlu memperhatikan

faktor lain seperti kapasitas aparatur, kualitas perencanaan anggaran, kompetensi pengelola keuangan, digitalisasi pengelolaan keuangan, serta kualitas pengawasan eksternal. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa efisiensi Dana Desa merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan penguatan tata kelola secara terpadu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa secara parsial pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan Partisipasi Masyarakat menunjukkan pengaruh positif namun belum signifikan pada tingkat 5%. Secara simultan, Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Anggaran Dana Desa dengan nilai $F = 3,891$ dan signifikansi 0,016. Model penelitian memiliki nilai *R Square* sebesar 0,235, yang berarti ketiga variabel tersebut secara bersama-sama menjelaskan 23,5% variasi Efisiensi Anggaran Dana Desa, sedangkan 76,5% dipengaruhi faktor lain di luar model. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi anggaran desa memerlukan penguatan pengendalian internal, partisipasi masyarakat yang lebih substantif, serta transparansi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi didukung oleh keterbukaan informasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

- Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Sungai Apit, pengendalian internal perlu diperkuat pada tahap pelaksanaan anggaran melalui pemisahan tugas, pemeriksaan kelengkapan bukti transaksi, dan verifikasi kegiatan secara berkala. Transparansi juga perlu ditingkatkan dengan menyajikan informasi anggaran dan realisasi secara sederhana melalui papan informasi desa atau media digital agar mudah dipahami masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, tidak hanya pada tahap perencanaan.
- Bagi Pemerintah Kabupaten Siak, khususnya DPMK dan Inspektorat, diperlukan pembinaan dan pengawasan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pendampingan dapat diprioritaskan kepada desa yang masih menghadapi kendala dalam administrasi dan digitalisasi pengelolaan Dana Desa.

- Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi Efisiensi Anggaran Dana Desa, seperti kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas perencanaan anggaran, dan komitmen organisasi. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan cakupan wilayah dan jumlah responden yang lebih luas untuk memperoleh hasil yang lebih representatif.

REFERENSI

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (16th ed.). Pearson.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi sektor publik* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Bancin, D. S. N. B., Nasution, Y. S. J., & Rahmani, N. A. B. (2024). The influence of transparency, internal control systems, human resource competency, and community participation on the accountability of village fund management. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(3). <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i3.3137>
- Damora, S., & Susilowati, E. (2023). Akuntabilitas memediasi sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap transparansi alokasi dana desa di Kecamatan Mojoagung. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(1). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.7108>
- Dewi, N. K., Herawati, N. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2013). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 1–10.
- Febriarty, A., Widyarti, M. T. H., & Romangsi, I. N. (2022). The influences of accountability, transparency and internal control with participation as moderation variable on fraud prevention in village funds management. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS Statistics 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Hidayat, R. (2019). Pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efisiensi pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 45–58.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sari, D. W., Santosa, R. E. W. A., & Nurcahyono. (2024). The effect of transparency, participation and internal control system on the accountability of village fund management. *Economics and Business International Conference Proceeding*.

- Suhartini, A., Budiman, B., Hendarsyah, D., & Junery, M. F. (2025). Internal control system, transparency, and village financial management accountability: Evidence from one village in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(4), 1–18. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i4.1604>
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–482.
- Widodo, J. (2020). *Good governance: Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi*. Bumi Aksara.
- Yunni, Y., Azlina, N., & Nurulita, S. (2022). Effect of transparency, human resources competence, community participation, government internal control system, village apparatus commitment to management village fund. *Terbuka Journal of Economics and Business*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.33830/tjeb.v3i2.3738>